

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, dan masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut (Luh, 2014)

Adanya otonomi daerah menuntut secara tidak langsung pemerintah daerah untuk menyajikan Laporan Keuangan secara transparan dan tepat. Pemerintah daerah diwajibkan untuk bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat dalam penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok akan fungsi yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan (kartika, 2015)

Terkait dengan kualitas laporan keuangan daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka yang perlu diperhatikan adalah Standar Akuntansi Pemerintah, Peran Auditor Internal dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi yang terlibat dalam kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang handal dan relevan.

Berdasarkan informasi pada tanggal 7 april 2015 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kota Bandar Lampung memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kemudian pada tahun sebelumnya laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014 bahwa telah mencapai WTP, hal ini disampaikan Kepala Perwakilan, BPK Kota Bandar Lampung V.M. Ambar Wahyuni kepada Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Naldi Rinara dan Walikota Bandar Lampung, Herman HN di auditorium Kantor Perwakilan BPK Kota Bandar Lampung. (*sumber : www.bpk.go.id*)

Adapun informasi yang mendukung, menurut Kepala Perwakilan berharap opini WTP kelima kalinya secara berturut-turut ini dapat dipertahankan dan dapat diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Semoga opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan, dan yang lebih penting lagi, opini yang dicapai dapat diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung secara adil dan merata,” tegas V.M. Ambar Wahyuni. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung Naldi Rinara mengapresiasi kinerja pemerintah kota Bandar Lampung sehingga berhasil mendapatkan predikat WTP. Menurutnya, prestasi ini patut dipertahankan sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam masalah pengelolaan laporan keuangan daerah. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Sunarto mengatakan, capaian opini WTP ini diberikan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. (*sumber : www.bpk.go.id*)

WTP yang diberikan ini adalah bentuk opini yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memberikan laporan secara akuntabel. Mengenai defisit atau tidaknya keuangan pemerintah, itu tidak menjadi permasalahan. Asalkan semua laporan keuangan diungkapkan semua kepada BPK. opini laporan keuangan tahun 2016 dapat dipertahankan dan lebih baik lagi. Yang lebih penting lagi, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin baik secara opini yang telah dicapai dan diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung dan terlepas dari itu Pemerintahan juga memiliki kelemahan pada pengendalian laporan akuntansi.

Disamping itu, masih sedikitnya penelitian tersebut dan perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti ingin berkelanjutan untuk meliti lebih lanjut tentang pelaporan yang dilakukan di SKPD daerah Kota Bandar Lampung, sehingga penelitian ini diberi judul:

**“FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”
(Studi Empiris Pada SKPD Kota Bandar Lampung)”**

1.2 Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas dilakukan di SKPD Pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini hanya membahas apakah Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Peran Auditor Internal dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandar Lampung ?
2. Apakah Peran Auditor Internal berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandar Lampung?
3. Apakah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandar Lampung?

1.4 Tujuan penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah Peran Auditor Internal berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandar Lampung
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandar Lampung

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- Pada Akademisi : Dapat memberika kontribusi dalam menambah literatur mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Peran Auditor Internal, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Pada Praktisi : sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparansi dan akuntabilitas.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam penyusunan penelitian ini, maka penyusunannya dilakukan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, dimana di dalamnya terdapat identifikasi masalah, perumusan masalah, terdapat juga tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menjelaskan teori-teori yang terkait pada penelitian yang mendasari terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti, serta menjelaskan kerangka pemikiran yang memuat seluruh kegiatan penelitian mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap penyelesaian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menyatakan Tempat, Waktu dan Metode Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis, Sumber Data yang Digunakan dan Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan dan menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti menguraikan kesimpulan, yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Dan disertai dengan saran-saran yang disimpulkan dari penelitian tersebut

DAFTAR PUSTAKA